



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUBAROK
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 274392

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 710.000.000

1. Tanah Seluas 2335 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 160.000.000
2. Tanah Seluas 710 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/100 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 178.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---**F. HARTA LAINNYA** Rp. 120.000.000**Sub Total** Rp. 1.008.000.000**III. HUTANG** Rp. 240.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 768.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRAPTI BAYU BASUKI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 717159

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	590.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1025 m2/104 m2 di WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000		
2. Tanah Seluas 211 m2 di WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	170.037.730
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	775.037.730
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	775.037.730

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUHARTONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 755010

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 550.400.000

1. Tanah Seluas 732 m2 di WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 292.800.000
2. Tanah Seluas 154 m2 di WONOGIRI, WARISAN Rp. 61.600.000
3. Tanah Seluas 490 m2 di WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 196.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 173.400.000

1. MOBIL, DAIHATSU TARUNA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 86.000.000
3. MOTOR, SUZUKI TITAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.800.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 36.400.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 368.731.159

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.128.931.159

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.128.931.159

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EMILIA SUSANTI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
3. NHK : **715322**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1.671.200.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/250 m2 di WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
2. Tanah Seluas 199 m2 di WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
3. Tanah Seluas 66 m2 di WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 65.400.000
4. Tanah Seluas 282 m2 di WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 258.800.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/72 m2 di WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
6. Tanah Seluas 270 m2 di WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

138.000.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

60.406.100



D. SURAT BERHARGA	Rp.	74.800.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	272.644.093
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.217.050.193
III. HUTANG	Rp.	25.687.065
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.191.363.128

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RETNO ARI ERLINA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 714521

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 220.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m2/304 m2 di WONOGIRI,
WARISAN Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 49.375.000

1. MOTOR, YAMAHA 4D7 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG STANDART KF 42 SHORT Tahun 1996,
LAINNYA Rp. 30.000.000
3. MOTOR, HONDA D1B02N261.2A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 15.375.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 52.161.159

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 350.036.159

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 350.036.159

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.